

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan)

Reynaldi Aji Prasetya¹, Yohana Kus Suparwati², Rudi Suryo Kristanto³

^{1,2,3} STIE Bank BPD Jateng

¹Email: rey.ajiprasetya@gmail.com

²Email: yohana.kussuparwati@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and examine the effect of budgetary participation, clarity of budget targets, and public accountability on the managerial performance of local governments. The population in this study were all Regional Apparatus Organizations (OPD) in Grobogan Regency. The sample in this study were 81 respondents. The selected respondents are the head/leader of the Regional Apparatus Organization (OPD), the head of the finance sub-section, the head of the planning and evaluation sub-section in each Regional Apparatus Organization. This sampling method uses purposive sampling. The analytical tool used is the IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21. The results of this study indicate that clarity of budget targets, and public accountability have a significant positive effect on the managerial performance of local governments. budgetary participation has not effect on the managerial performance of local governments.

Keywords: managerial performance of local governments

Abstrak

Pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas. Kinerja manajerial merupakan alat penilaian untuk memotivasi aparatur dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta menuntun perilaku aparatur untuk sesuai dengan standar perilaku yang telah ditetapkan oleh organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Grobogan. Sampel pada penelitian ini sebanyak 81 responden. Responden terpilih adalah kepala/pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala sub bagian keuangan, kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Metode pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah IBM Statistical Package for Sosial Sciences (SPSS) versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah. Variabel partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

Kata kunci : kinerja manajerial pemerintah daerah

1. Pendahuluan

Pemerintah Daerah merupakan salah satu bagian dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah harus diimbangi dengan kinerja yang baik. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan/program/ yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Kinerja manajerial merupakan alat penilaian untuk memotivasi aparatur dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta menuntun perilaku aparatur untuk sesuai dengan standar perilaku yang telah ditetapkan oleh organisasi (Seber et al., 2019). Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan

mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut (Annisa et al., 2020). Tidak hanya untuk masyarakat, Pemerintah Daerah juga harus dapat bertanggung jawab atas kinerjanya sendiri karena di akhir periode akan dilakukan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK.

Berdasarkan UU No. 15 tahun 2006 bahwa segala bentuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara dilakukan oleh BPK. BPK juga memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya tindak kecurangan salah satunya di pemerintah daerah yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Dalam pemeriksaan triwulan III, BPK menemukan penyerapan anggaran yang masih rendah di Kabupaten Grobogan, terutama dalam hal alokasi belanja langsung. Capainnya masih di bawah target yang ditentukan, yaitu hanya mencapai 39,10 persen pada realisasi keuangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan mengatakan alokasi belanja langsung dalam APBD pada triwulan ketiga yaitu, Rp 1.223.494.797 atau sekitar 45,23% dari total anggaran sebesar Rp 2.704.857.077.774. Pada akhir September 2019, capaian realisasi keuangan hanya Rp 478.420.095.885 atau sekitar 39, 10 persen. Padahal target yang ditentukan yaitu Rp 594.549.543.023 atau sekitar 48,59 persen. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan meminta beberapa OPD yang capaian realisasi masih rendah agar segera melaksanakan program dan kegiatan yang belum tercapai. Keterlambatan dapat menimbulkan banyak efek. Selain itu, seluruh kepala OPD harus mengendalikan seluruh kegiatan sehingga yang telah dianggarkan dapat terealisasi dan yang terpenting, harus benar-benar mencegah

terjadinya permasalahan hukum. (<https://jateng.bpk.go.id/penyerapan-anggaran-masih-rendah/>)

Kinerja manajerial pemerintah daerah merupakan isu yang saat ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat dan mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah (Sari et al., 2016). Kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu kunci keberhasilan OPD dalam menjalankan tugasnya di pemerintah daerah, karena kinerja yang baik akan berdampak pada tata kelola pemerintah yang baik (Melia & Sari, 2019). Penilaian terhadap kinerja manajerial OPD menjadi hal yang sangat penting karena penilaian kinerja manajerial akan membantu mengoptimalkan organisasi sektor publik terhadap pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan guna mencapai tujuan organisasi sektor publik.

Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja manajerial adalah partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik. Menurut (Nugroho, 2018) Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan seluruh manajer atau pimpinan dan bawahan berpartisipasi dalam menyiapkan anggaran dan dapat mempengaruhi tujuan anggaran dari pusat pertanggungjawaban mereka masing-masing. Hal ini cukup penting karena aparat pemerintah daerah akan merasa lebih berhasil dalam menjalankan pekerjaannya sehingga memungkinkan timbulnya rasa puas yang dapat meningkatkan kinerjanya. Kinerja akan dikatakan efektif ketika pihak bawahan mendapat kesempatan terlibat dalam penyusunan anggaran. Hal ini kemungkinan juga dapat mempengaruhi kinerja manajerial karena bawahan merasa terlibat dalam penyusunan anggaran sehingga diharapkan dapat melaksanakan anggaran dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hasil penelitian ini sejalan dengan (Annisa et al., 2020) dan (Widigdo, 2020) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Namun hal ini bertolak

belakang dengan penelitian (Nugroho, 2018) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi kinerja manajerial adalah Kejelasan Sasaran Anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana target anggaran ditentukan secara jelas dan spesifik yang bertujuan agar anggaran dapat dipahami oleh aparat yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Fauzan, 2016). Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja akan tercapai (Annisa et al., 2020). Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Hafiza, 2019). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Melia & Sari, 2019) dan (Hani, 2017) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Namun tidak sejalan dengan penelitian (Annisa et al., 2020) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi kinerja manajerial adalah Akuntabilitas Publik. Menurut (Mardiasmo, 2018) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut. Adanya akuntabilitas publik tentunya dapat meningkatkan kinerja manajerial karena semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan semakin baik pula kinerjanya mencapai tujuan organisasi. Peneliti sebelumnya menunjukkan adanya ketidak konsistenan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial yang ditunjukkan oleh (Seber et al., 2019) dan (Sari et al., 2016)

yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, sedangkan menurut penelitian (Candrakusuma & Bambang Jatmiko, 2017) menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Uraian latar belakang diatas permasalahan di atas menjadi fenomena yang sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian, berkenaan dengan kinerja manajerial pemerintah Kabupaten Grobogan maka menimbulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1)Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan? 2)Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan? 3)Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Goal Setting Theory dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1960. Menurut (Locke & Latham, 2006) untuk meningkatkan kinerja individu maka tujuan harus ditetapkan oleh individu yang melakukannya. Organisasi memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk ikut berpartisipasi dalam menetapkan tujuan cenderung kinerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan oleh atasan saja.

Teori ini menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja atau kinerja. Konsep dasar dari Teori Penetapan Tujuan adalah individu yang memahami tujuan atau sasaran akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Penerapan *Goal Setting Theory* dalam penelitian ini adalah bahwa untuk memperoleh kinerja manajerial yang optimal, harus ada keselarasan antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Individu yang memahami tujuan (sasaran) anggaran yang jelas dan ikut

berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan memiliki prestasi kerja (kinerja) lebih baik dibandingkan dengan individu yang tidak mengetahui tujuan (sasaran) anggaran secara jelas serta tidak berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. (Melia & Sari, 2019)

Kinerja Manajerial

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan/program/ yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Kinerja Manajerial adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh personil atau sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggungjawab mereka dalam menjalankan operasional organisasi (Melia & Sari, 2019). Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan lingkungannya, dengan cara memberikan pelayanan yang baik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Menurut (Sari et al., 2016) kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain : (1) Perencanaan (2) Investigasi (3) Pengkoordinasian (4) Evaluasi (5) Pengawasan (6) Pemilihan staf (7) Negosiasi (8) Perwakilan

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi merupakan sebuah proses pembuatan keputusan di antara dua orang atau lebih yang akan membawa dampak bagi keputusan di masa mendatang (Widigdo, 2020). Menurut Brownel dan Mc. Innes (1986) dalam (Sari et al., 2016) partisipasi penyusunan anggaran adalah keikutsertaan individu berupa perilaku, pekerjaan, dan aktifitas oleh aparat pemerintah selama proses penyusunan anggaran tersebut berlangsung.

Dalam partisipasi penyusunan anggaran keikutsertaan Kepala bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang dalam penentuan anggaran akan bermanfaat pada keputusan yang lebih realistis sehingga tercipta kesesuaian tujuan organisasi
ISSN: 2337778X

yang lebih baik. Sedangkan menurut (Badu et al., 2019) partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat memberikan kesempatan kepada atasan maupun bawahan untuk ikut serta menentukan bagaimana anggaran tersebut disusun sesuai dengan sasaran anggaran dimana bawahan dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran karena mereka mempunyai kecukupan informasi untuk memprediksi masa depan secara tepat, sehingga keterlibatan mereka mengurangi kecenderungan individu yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran untuk melakukan kesenjangan anggaran. Menurut (Sitepu, 2017) partisipasi anggaran dapat dilihat dari : (1) Melibatkan bawahan (2) Memberi kesempatan bawahan (3) Informasi kepada bawahan (4) Kontribusi bawahan dalam anggaran OPD

Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka Panjang (Safitri et al., 2015). Salah satu karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran yang merupakan sejauh mana target anggaran ditentukan secara jelas dan spesifik yang bertujuan agar anggaran dapat dipahami oleh aparat yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Fauzan, 2016). Kejelasan sasaran anggaran juga merupakan salah satu penentu dalam pencapaian kinerja manajerial. Seorang pemimpin harus menentukan apa yang menjadi tujuan organisasi. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan, dan ketidakpuasan dari karyawan sehingga akan berdampak buruk terhadap kinerja manajerial. Dalam penelitian ini pengukuran sasaran anggaran yang efektif ada pada tujuh indikator (Melia & Sari, 2019) : (1) Tujuan (2) Kinerja (3) Standar (4) Jangka waktu (5) Sasaran (6) Tingkat kesulitan (7) Koordinasi

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018)

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada semua reformasi sektor publik dan mendorong munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Akuntabilitas publik dalam penelitian ini diukur dengan dimensi akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Elwood (1993) dalam (Melia & Sari, 2019) yang diturunkan menjadi indikator yaitu :

1. Akuntabilitas kebijakan
Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi di masa depan.
2. Akuntabilitas program
Adalah program bermutu serta mendukung strategis atau pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaan program terealisasi.
3. Akuntabilitas manajerial
Akuntabilitas manajerial atau kinerja ialah pertanggungjawaban untuk melaksanakan pengelolaan organisasi secara tepat.
4. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
Akuntabilitas hukum yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran yaitu penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

Akuntabilitas publik dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut (Tarjo, 2019)

- (1) Kejujuran dan keterbukaan informasi (2) Kepatuhan dalam pelaporan (3) Kesesuaian prosedur (4) Kecukupan informasi (5) Ketepatan penyampaian informasi

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah

Partisipasi anggaran merupakan kegiatan keikutsertaan dalam menyusun anggaran dengan cara melibatkan pejabat OPD dari level kepala hingga staff untuk menentukan berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD dalam menjalankan organisasinya selama satu tahun. Seseorang yang terlibat dalam penyusunan anggaran akan termotivasi dalam situasi kelompok karena diberi kesempatan untuk mewujudkan inisiatif dan daya kreatifitas.

Dalam *Goal Setting Theory* menyatakan bahwa apabila organisasi memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk ikut berpartisipasi dalam menetapkan tujuan cenderung kinerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan oleh atasan saja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Badu et al., 2019) (Annisa et al., 2020) dan (Widigdo, 2020) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh secara positif terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah

H₁ = Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah

Kejelasan sasaran anggaran dapat membantu pegawai untuk meraih kinerja yang diharapkan, dengan mengetahui sasaran anggaran yang jelas ini, maka dapat memudahkan dalam mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidak jelasan sasaran anggaran akan membuat pelaksana anggaran menjadi bingung dan tidak tenang

Hal ini sejalan dengan *Goal Setting Theory* yang menyatakan bahwa individu yang mengetahui sasaran anggaran secara jelas akan lebih baik kinerjanya daripada individu yang tidak mengetahui sasaran anggaran secara jelas. Tujuan yang jelas dalam suatu organisasi akan membuat individu bekerja dengan lebih giat dalam mencapai tujuan sehingga kinerja yang didapatkan akan meningkat daripada tidak ada sasaran atau keharusan yang harus mereka capai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Safitri et al., 2015) (Melia & Sari, 2019) (Hani, 2017) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara positif terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

H₂ = Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus

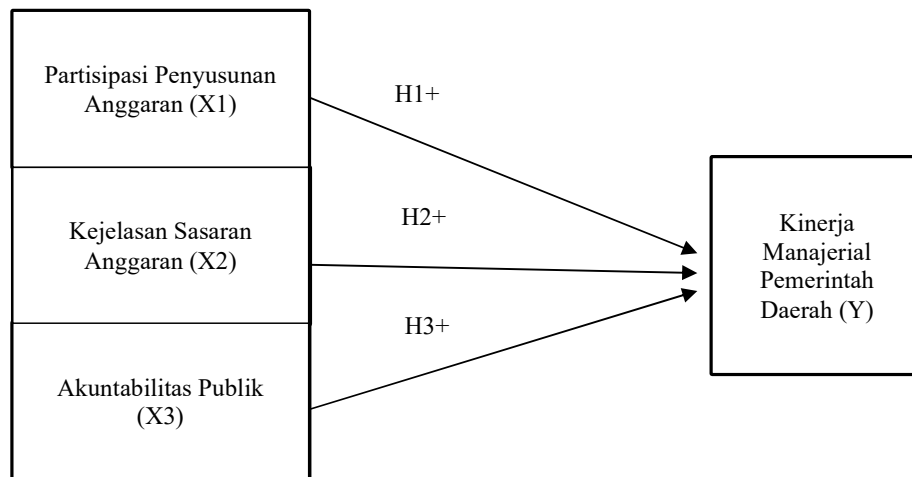
benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan pelaksanaan anggaran tersebut (mardiasmo, 2018).

Jika dikaitkan dengan *Goal setting Theory*, akuntabilitas ini cukup penting dalam meningkatkan kinerja manajerial karena semakin tinggi pertanggungjawaban dalam segala hal yang dilaksanakan di organisasi maka semakin tinggi pula kinerja yang akan dihasilkan. Dengan kinerja yang tinggi tersebut maka tujuan-tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2016) (Hani, 2017) dan (Seber et al., 2019) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

H₃ = Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pemerintah.

3. Model Penelitian



4. Metode Penelitian

Populasi pada penelitian ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Grobogan yang berjumlah 27 OPD. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan

metode *purposive sampling* dimana dalam pengambilan sampel terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan serta memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini,

seluruh populasi yakni 27 OPD ditetapkan sebagai sampel penelitian. Setiap OPD diberikan 3 kuesioner untuk diisi pejabat yang menjabat sebagai kepala instansi/organisasi perangkat daerah, kepala sub bagian keuangan, dan kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi. Maka jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 81 responden. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu pendekatan dengan menganalisis perhitungan angka yang didukung menggunakan sebuah perangkat lunak yaitu *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 21.

5. Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Keandalan Instrumen Penelitian Uji Validitas dan reliabilitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya indikator dalam kuesioner. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table. Pada penelitian ini jumlah sampel (n) = 81 dan α (α) = 0,05, derajat kebebasan (df) = $n-2$ = $81-2$ = 79, didapat r table sebesar 0,215. Hasil uji validitas yang telah dilakukan menunjukkan Pearson Correlation dari masing-masing variabel menunjukkan r hitung $>$ r table (0,215) dengan nilai signifikansi $<$ 0,05. Maka pernyataan yang ada di kuesioner tersebut adalah valid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang terdapat di kuesioner telah mampu untuk mengukur setiap variabel yang diharapkan.

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini yaitu teori Cronbach Alpha, suatu variabel dikatakan reliable jika memiliki nilai cronbach alpha $>$ 0,70. Berdasarkan dari uji reliabilitas, menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha (α) untuk setiap variabel lebih $>$ 0,70. Artinya semua konsep pengukur masing2 variabel dan kuesioner adalah reliable yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Hasil pengujian statistic One Sampel
ISSN: 2337778X

Kolmogrov-Smirnov di atas menunjukkan hasil/nilai signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,251 dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal atau memenuhi syarat uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang dilakukan, variabel partisipasi penyusunan anggaran memiliki nilai tolerance 0,992 dengan VIF 1,008, maka dapat diketahui bahwa nilai tolerance 0,992 $>$ 0,10 dan nilai VIF 1,008 $<$ 10 maka variabel tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai tolerance 0,993 dengan nilai VIF 1,007, maka dapat diketahui bahwa nilai tolerance 0,993 $>$ 0,10, dan nilai VIF 1,007 $<$ 10 maka variabel tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Variabel akuntabilitas publik memiliki nilai tolerance 0,999 dengan nilai VIF 1,001, maka dapat diketahui bahwa nilai tolerance 0,999 $>$ 0,10 dengan nilai VIF 1,001 $<$ 10 maka variabel tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dari hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai tolerance $>$ 0,10 dan nilai VIF $<$ 10, sehingga dapat disimpulkan dalam data penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastis

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastis, dalam penelitian ini digunakannya Uji Glejser. Berdasarkan hasil Uji Glejser yang dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran (X1) memperoleh nilai sig. 0,738, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastis. Variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) memperoleh nilai 0,521, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastis. Serta variabel Akuntabilitas Publik (X3) memperoleh nilai sig. 0,713, maka dapat disimpulkan variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastis. Dari hasil tersebut semua variabel memperoleh sig $>$ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastis atau bisa dikatakan asumsi non-heteroskedastis telah terpenuhi.

Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis linier berganda dapat diketahui bahwa konstanta (α) = 7,287. Nilai koefisien regresi $b_1 = 0,071$, nilai koefisien $b_2 = 0,438$, dan nilai koefisien $b_3 = 0,334$. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditentukan persamaan regresi linier berganda pola pengaruh variabel partisipasi penyusunan anggaran (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2), serta akuntabilitas publik (X3) terhadap kinerja manajerial (Y) dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$PF = 7,287 + 0,071PPA + 0,438KSA + 0,334AP + e$$

(sig 0,690) (sig 0,000) (sig 0,014)

Uji Hipotesis

Uji Simultan (F-test)

Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel independen

secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut uji kelinieran persamaan regresi. Nilai F dalam table (ANOVA) digunakan untuk menguji apakah model yang digunakan sudah layak atau belum dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh F hitung sebesar 36,874 dengan nilai signifikan F sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$. Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, maka variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial.

Uji Statistik t (t-test)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Berikut ini adalah hasil pengujian uji parsial :

Hasil Uji Statistik t (t-test)

Model	B	Sig.
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1)	0,071	0,690
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	0,438	0,000
Akuntabilitas Publik (X3)	0,334	0,014

Sumber: Hasil olah data primer, 2021

1. Hipotesis 1

Nilai signifikansi pengaruh variabel partisipasi penyusunan anggaran sebesar 0,690 dan koefisien regresi bertanda positif. Oleh karena nilai signifikan yang diperoleh $> 0,05$ dan koefisien regresi positif maka partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja manajerial, maka H1 ditolak.

2. Hipotesis 2

Nilai signifikansi pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,000 dan koefisien regresi bertanda positif. Oleh karena nilai signifikan yang diperoleh $< 0,05$ dan koefisien regresi positif maka kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial, maka H2 diterima.

3. Hipotesis 3

Nilai signifikansi variabel akuntabilitas publik sebesar 0,014 dan koefisien regresi bertanda positif. Oleh karena nilai signifikan yang diperoleh $< 0,05$ dan koefisien regresi positif maka akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial, maka H3 diterima.

Uji Koefisien Determinasi / Adjusted R Square

Uji koefisien determinasi / adjusted r square adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam persen pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Hasil dari analisa ini dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,768 ^a	0,590	0,574	2,672

Sumber: Hasil olah data primer, 2021

Hasil pengujian koefisien determinasi / adjusted r square diperoleh nilai adjusted r square sebesar 0,574 atau 57,4%. Artinya bahwa kinerja manajerial dipengaruhi oleh 57,4% variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, serta akuntabilitas publik. Sedangkan 42,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Diskusi

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial

Hasil uji signifikan menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Artinya, partisipasi penyusunan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kontribusi bawahan dalam penyusunan anggaran dalam OPD. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil responden yang menunjukkan bahwa nilai terendah terdapat pada indikator kontribusi bawahan dalam penyusunan anggaran OPD, dimana responden yang memberikan nilai terendah 2 (TS) sebanyak 5 responden, serta nilai 3 (KS) sebanyak 11 responden. Dalam variabel partisipasi penyusunan anggaran yang memiliki nilai terendah 2 dan 3 terbanyak diisi pada indikator kontribusi bawahan dalam OPD dibandingkan dengan melibatkan bawahan, memberikan kesempatan kepada bawahan, dan informasi kepada bawahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Nugroho, 2018) dan (Candrakusuma & Bambang Jatmiko, 2017) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, namun tidak sejalan dengan penelitian (Annisa et al., 2020) dan (Widigdo, 2020) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial

Hasil uji signifikan menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Artinya, kejelasan sasaran anggaran dalam OPD Kabupaten Grobogan berjalan secara optimal dan dapat mempengaruhi kinerja manajerial. Hal ini sejalan dengan *Goal Setting Theory* yang menyatakan bahwa individu yang mengetahui sasaran anggaran secara jelas akan lebih baik kinerjanya daripada individu yang tidak mengetahui sasaran anggaran secara jelas. Tujuan yang jelas dalam suatu organisasi akan membuat individu bekerja dengan lebih giat dalam mencapai tujuan sehingga kinerja yang didapatkan akan meningkat daripada tidak ada sasaran atau keharusan yang harus mereka capai. Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian (Melia & Sari, 2019) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini juga didukung dengan hasil responden yang menunjukkan bahwa semua indikator memiliki indeks yang tinggi, dimana nilai minimum sebesar 62%, nilai maksimum 73%, serta nilai rata-rata sebesar 66,7%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran sudah dijalankan dengan baik dalam setiap instansi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Melia & Sari, 2019) dan (Hani, 2017) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial, namun tidak sejalan dengan (Annisa et al., 2020) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial

Hasil uji signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Artinya, akuntabilitas publik dalam OPD Kabupaten Grobogan berjalan secara optimal dan dapat

mempengaruhi kinerja manajerial. Hal ini sejalan dengan *Goal setting Theory* karena semakin tinggi pertanggungjawaban dalam segala hal yang dilaksanakan di organisasi maka semakin tinggi pula kinerja yang akan dihasilkan. Dengan kinerja yang tinggi tersebut maka tujuan-tujuan dari organisasi dapat tercapai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Seber et al., 2019) akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini juga didukung dengan hasil responden yang menunjukkan bahwa semua indikator memiliki indeks yang tinggi, dimana nilai minimum sebesar 70,2%, nilai maksimum sebesar 73,8%, serta nilai rata-rata sebesar 71,72%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas publik sudah dijalankan dengan baik dalam setiap instansi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Seber et al., 2019) dan (Sari et al., 2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, namun tidak sejalan dengan (Candrakusuma & Bambang Jatmiko, 2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dapat disimpulkan bahwa :

1. Partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini disebabkan oleh nilai signifikan yang diperoleh dari uji t dimana nilai signifikan $> 0,05$, yang artinya bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Serta memiliki salah satu indikator yang kurang dijalankan dengan baik dan memiliki nilai indeks respon responden yang rendah.
2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial.

Hal ini disebabkan oleh nilai signifikan yang diperoleh dari uji t dimana nilai signifikan $< 0,05$, yang artinya bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Serta hasil dari nilai indeks respon responden yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran telah dijalankan dengan baik dalam kinerja manajerial di OPD Kabupaten Grobogan.

3. Akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini disebabkan oleh nilai signifikan yang diperoleh dari uji t dimana nilai signifikan $< 0,05$, yang artinya bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Serta hasil dari nilai indeks respon responden yang menunjukkan bahwa akuntabilitas publik telah dijalankan dengan baik dalam kinerja manajerial di OPD Kabupaten Grobogan.

Daftar Pustaka

- Annisa, F., Sariningsih, E., & Luthfi, M. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Pesawaran). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 3(2), 1–14.
- Badu, I., Awaluddin, I., & Mas'ud, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Profesionalisme, Gaya Kepemimpinan dan Struktur Organisasi terhadap Kinerja Manajerial. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 1–15. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP/article/view/6247>
- Candrakusuma, D., & Bambang Jatmiko. (2017). Dampak Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 87–93.
- Ermawati, N., & Apriyanti, H. W. (2016).

- Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi kerja sebagai variabel Pemoderasi. *Indonesia, Jurnal Akuntansi*, 6(2), 141–155.
- Fauzan, R. H. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provin. *JOMFekom*, 4(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Ferdinand, A. (2014). *Metode penelitian manajemen: Pedoman penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi ilmu manajemen (5th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- Hafiza, P. E. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4, 763–773.
- Hani, M. (2017). Faculty of Economics Riau University ,. *JOMFekom*, 4(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2006). New directions in goal-setting theory. *Current Directions in Psychological Science*, 15(5), 265–268. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2006.00449.x>
- mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. penerbit andi.
- Melia, P., & Sari, V. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1068–1079.
- Nugroho, P. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Pemda Kabupaten Pekalongan, Pemda Kota Pekalongan, Dan Pemda Kabupaten Sleman) [Skripsi]*.
- Safitri, D., Agusti, R., & Nugraha, V. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33930.
- Sari, E., Taufik, T., & Hasan, M. (2016). PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK, DESENTRALISASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 380–393.
- Seber, I., Rustam, F., & Husain, S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1068–1079. <http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/128>
- Sitepu, O. O. (2017). *Universitas Sumatera Utara* 4. 4–16.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Tarjo, T. (2019). (Studi pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten The Influence Of The Competence Of Village Officials And Organizational Commitment To The. *Jurnal Tata S*, 5(2).
- Widigdo, A. L. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *Canopy*, 17(2), 14–22.